



**ANALISIS PENERAPAN CORETAX DAN IMPLIKASINYA PADA
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERBASIS *TAX COMPLIANCE*:
*SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK***

Ariyanto Telaumbanua^{1*}, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Tresno Eka Jaya³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This research investigates individual taxpayers' perceptions regarding the CoreTax system implementation using the Technology Acceptance Model (TAM) approach, while simultaneously analyzing its impact on taxpayer compliance through the Slippery Slope Framework (SSF). Utilizing a qualitative approach with a phenomenological design, data were gathered through observations, semi-structured interviews, and documentation involving a tax extension officer from the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DJP) Banten and individual taxpayers experienced in both SIDJP and CoreTax. The findings reveal that CoreTax offers significant benefits, including automated data processing, integrated tax services, and streamlined administrative access within a single platform. Nevertheless, the perceived ease of use remains affected by technical constraints and varying levels of digital literacy among taxpayers. From the SSF perspective, CoreTax bolsters the power dimension through rigorous digital surveillance and nurtures the trust dimension via enhanced transparency and service quality. The synergy between these two dimensions ultimately fosters taxpayer compliance, emerging both voluntarily and through systematic enforcement.

Keywords: CoreTax, Taxpayer Compliance.

How to Cite:

Telaumbanua, A., Ulupui, I. G. K. A., & Jaya, T. E. (2026). Analisis Penerapan Coretax dan Implikasinya pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis *Tax Compliance: Slippery Slope Framework*, Vol. 7, No. 1, hal. 195–201.

PENDAHULUAN

Fenomena kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir yang menarik untuk ditelaah, sebagaimana tergambar pada data berikut ini:

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2022-2024 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.273.366	19.182.071	19.075.197
a. Badan	2.060.213	1.665.826	1.567.298
b. Orang Pribadi Karyawan	12.288.392	13.925.788	13.842.704
c. Orang Pribadi Non dKaryawan	4.924.761	3.590.457	3.665.195
SPT Tahunan PPh	15.930.939	16.682.564	16.556.759
a. Badan	1.186.470	1.162.453	1.052.482
b. Orang Pribadi Karyawan	13.367.603	13.099.917	12.971.323
c. Orang Pribadi Non Karyawan	1.376.866	2.420.194	2.532.954
Rasio Kepatuhan	82,66%	86,97%	86,80%
a. Badan	57,59%	69,78%	67,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	108,78%	94,07%	93,71%
c. Orang Pribadi Non Karyawan	27,96%	67,41%	69,11%

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, rasio kepatuhan wajib pajak berdasarkan penyampaian SPT Tahunan PPh mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 persentase yang diperoleh adalah 86,80% yang kemudian naik menjadi 86,97% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 rasio tersebut menurun menjadi 82,66%. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok Wajib Pajak (WP) Badan yang hanya mencatatkan persentase sebesar 57,59% serta WP Orang Pribadi Non Karyawan yang hanya sebesar 27,96%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas kepatuhan formal wajib pajak menghadapi tantangan pada masa transisi administrasi perpajakan menuju sistem yang lebih terintegrasi. Penurunan kepatuhan tersebut terjadi bersamaan dengan proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit yang menjadi bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Proses integrasi identitas antara NIK dan NPWP ini memunculkan berbagai kendala administratif dan teknis, seperti validasi data, pembatasan akses layanan perpajakan bagi wajib pajak yang belum menyelesaikan pemadanan data, serta meningkatnya kebutuhan adaptasi terhadap mekanisme administrasi yang baru (Arini, 2024). Di sisi lain, pada tahun 2025 sebagai otoritas perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengimplementasikan CoreTax menjadi sistem inti administrasi perpajakan yang menggantikan sistem sebelumnya. Meskipun realisasi penerimaan pajak secara tahunan menunjukkan peningkatan, implementasi awal CoreTax masih memiliki

berbagai permasalahan operasional, seperti gangguan pada sistem, kesalahan validasi data, dan hambatan dalam proses administrasi perpajakan yang berdampak pada pelayanan kepada wajib pajak (Badan Pusat Statistik, 2026; MUC Consulting, 2025).

CoreTax adalah bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dirancang mengintegrasikan 21 proses bisnis administrasi perpajakan ke dalam satu platform. Sistem ini menyediakan berbagai fitur, seperti *prepopulated* SPT, *Taxpayer Account Management* (TAM), penggunaan NPWP berbasis NIK, serta *Compliance Risk Management* (CRM). Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat kualitas pengawasan, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, keberhasilan implementasi CoreTax tidak hanya berdasarkan kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut mampu diterima dan dimanfaatkan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Dalam menggambarkan perilaku kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menggunakan *Slippery Slope Framework* (SSF) sebagai landasan teori utama. SSF menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keseimbangan antara dimensi *power*, yaitu kemampuan otoritas perpajakan dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan, serta dimensi *trust*, yaitu kepercayaan WP terhadap otoritas perpajakan. Kepatuhan yang tinggi dapat terbentuk melalui kombinasi kedua dimensi tersebut sehingga menghasilkan *voluntary compliance* maupun *enforced compliance* (Günay, 2022). Untuk melengkapi analisis tersebut, penelitian ini juga menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan sebagai teori pendukung. TAM menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu sistem dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*). Dalam konteks CoreTax, kedua persepsi tersebut diperkirakan berkontribusi terhadap pembentukan kepercayaan WP yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan (Wicaksono, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SSF masih relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Ramadhan dan Rodoni (2021) menemukan bahwa dimensi *trust* dan *power* memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan *Extended Slippery Slope Framework*. Penelitian tersebut memberikan bukti empiris mengenai pentingnya keseimbangan antara kepercayaan dan kekuasaan kepada otoritas dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, Linawati dan Djaddang (2024) melalui Systematic Literature Review menegaskan bahwa *Slippery Slope Framework* masih menjadi model yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan perpajakan pada berbagai konteks. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum mengkaji implementasi CoreTax sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap sistem tersebut memengaruhi pembentukan kepatuhan pada masa transisi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara persepsi WP terhadap implementasi CoreTax dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks transformasi digital administrasi perpajakan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan TAM dan SSF untuk menjelaskan bagaimana persepsi terhadap kemudahan dan kebermanfaatan CoreTax berkontribusi terhadap pembentukan dimensi *trust* dan *power*, serta implikasinya terhadap kepatuhan WP orang pribadi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak terhadap penerapan CoreTax sebagai sistem administrasi perpajakan serta mengkaji implikasinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan *Slippery Slope Framework*.

TINJAUAN TEORI

Slippery Slope Framework (SSF)

SSF merupakan teori yang dikemukakan oleh Kirchler, Hoelzl, dan Wahl untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak melalui interaksi antara dua dimensi utama, yaitu *trust* dan *power*. Dimensi *trust* menggambarkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan yang tercermin melalui persepsi mengenai integritas, transparansi, keadilan, dan kualitas pelayanan. Sementara itu, dimensi *power* menggambarkan kemampuan pemegang otoritas dalam melakukan

pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan aturan untuk memastikan kepatuhan. Menurut *SSF*, keseimbangan antara kedua dimensi tersebut akan menjadikan kepatuhan yang lebih berkelanjutan dibandingkan apabila hanya salah satu dimensi saja (Adini et al., 2021; Günay, 2022).

Dalam konteks implementasi CoreTax, dimensi power tercermin melalui peningkatan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan berbasis data melalui integrasi informasi perpajakan. Di sisi lain, dimensi trust dibangun melalui penyediaan layanan administrasi perpajakan yang lebih transparan, terintegrasi, serta mudah diakses. Oleh karena itu, *SSF* digunakan sebagai landasan teori utama guna menjelaskan implikasi implementasi CoreTax terhadap tingkat kepatuhan.

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM yang dikemukakan oleh Davis menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use*. *Perceived Usefulness* merupakan keyakinan bahwa penggunaan suatu sistem mampu meningkatkan kinerja atau efektivitas pengguna, sedangkan *Perceived Ease of Use* menunjukkan tingkat kemudahan yang dirasakan ketika menggunakan sistem tersebut (Adini et al., 2021).

Dalam penelitian ini, *TAM* digunakan sebagai teori pendukung untuk menganalisis persepsi wajib pajak terhadap implementasi CoreTax. Persepsi mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan sistem menjadi dasar dalam memahami penerimaan wajib pajak terhadap CoreTax sebelum dianalisis implikasinya terhadap dimensi *trust*, *power*, dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan *Slippery Slope Framework*.

CoreTax

CoreTax merupakan implementasi Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dikembangkan oleh DJP untuk mengintegrasikan proses administrasi perpajakan menjadi satu sistem digital. CoreTax menyediakan berbagai layanan perpajakan secara terintegrasi, seperti registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), administrasi akun wajib pajak (*Taxpayer Account Management*), serta pengelolaan risiko kepatuhan (*Compliance Risk Management*). Integrasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan, akurasi data, dan efektivitas pengawasan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia, implementasi CoreTax memerlukan proses adaptasi baik dari sisi otoritas perpajakan maupun wajib pajak. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan CoreTax menjadi aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi sistem tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup kepatuhan formal, yakni kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administratif seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak tepat waktu, serta kepatuhan material yang berkaitan dengan hal-hal seperti kebenaran perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai kondisi sebenarnya.

Dalam perspektif *Slippery Slope Framework*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan dan kekuatan pengawasan yang dimiliki otoritas. Implementasi CoreTax diharapkan mampu memperkuat kedua dimensi tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan, transparansi administrasi, dan pengawasan berbasis teknologi sehingga dapat mendorong terbentuknya kepatuhan wajib pajak secara sukarela maupun karena adanya pengawasan sistem.

Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *Slippery Slope Framework* maupun *Technology Acceptance Model* memiliki hubungan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ramadhan dan Rodoni (2021) menunjukkan bahwa dimensi *trust* dan *power* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan *Extended Slippery Slope Framework*. Linawati dan Djaddang (2024) juga menyimpulkan bahwa *Slippery Slope Framework* masih relevan digunakan dalam menjelaskan kepatuhan perpajakan pada berbagai konteks. Sementara itu, penelitian mengenai digitalisasi administrasi perpajakan menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem berperan dalam meningkatkan penerimaan teknologi oleh wajib pajak. Namun, penelitian yang mengintegrasikan persepsi terhadap implementasi CoreTax menggunakan Technology Acceptance Model dengan analisis kepatuhan berdasarkan *Slippery Slope Framework* masih terbatas.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari implementasi CoreTax sebagai bentuk transformasi digital administrasi perpajakan. Persepsi wajib pajak terhadap manfaat (*Perceived Usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) dianalisis menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Selanjutnya, hasil persepsi tersebut diinterpretasikan dalam perspektif *Slippery Slope Framework* melalui dimensi *trust* dan *power* untuk menjelaskan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi CoreTax tidak hanya diterima sebagai inovasi teknologi, tetapi juga memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan fenomenologi untuk memahami pengalaman serta pandangan pembayar pajak tentang penerapan Core Tax Administration System (CoreTax). Studi ini berlokasi di lingkungan administrasi pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, melibatkan pembayar pajak perorangan yang telah menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan juga CoreTax. Para narasumber dalam studi ini mencakup petugas penyuluh pajak serta pembayar pajak perorangan yang dipilih melalui metode purposive sampling berdasarkan kriteria relevan dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan informasi dilakukan lewat pengamatan, percakapan terstruktur sebagian, dan peninjauan dokumen. Informasi yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemangkasan data, penyajian data, serta perumusan kesimpulan. Guna menjamin ketepatan informasi, studi ini menggunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan temuan percakapan dan pengamatan dari setiap narasumber. Studi ini memakai Technology Acceptance Model (TAM) serta Slippery Slope Framework (SSF) sebagai dasar analisis guna mengerti hubungan antara penerimaan teknologi dan kepatuhan pembayar pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CoreTax) telah membawa perubahan dalam proses administrasi perpajakan sebagaimana dirasakan oleh wajib pajak maupun otoritas perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan memandang bahwa CoreTax memberikan manfaat berupa integrasi layanan perpajakan, kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan, serta otomatisasi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Fitur-fitur seperti prepopulated SPT dan *Taxpayer Account Management (TAM)* dinilai membantu wajib pajak dalam meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa CoreTax memiliki persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi CoreTax masih menghadapi berbagai kendala teknis. Beberapa informan mengungkapkan bahwa sistem masih mengalami gangguan *server*, waktu akses yang relatif lama, serta antarmuka pengguna yang dinilai cukup kompleks oleh sebagian wajib pajak. Kondisi tersebut memengaruhi persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) terhadap CoreTax. Selain itu, tingkat literasi digital juga menjadi

faktor yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CoreTax tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut.

Berdasarkan perspektif *Slippery Slope Framework (SSF)*, implementasi CoreTax berkontribusi dalam memperkuat dimensi *trust* dan *power* dalam administrasi perpajakan. Dimensi *trust* tercermin melalui meningkatnya transparansi layanan, kemudahan akses terhadap informasi perpajakan, serta integrasi data yang membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya. Sementara itu, dimensi *power* terlihat dari meningkatnya kemampuan otoritas perpajakan dalam melakukan pengawasan secara digital melalui integrasi data perpajakan dan otomatisasi sistem administrasi. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena meningkatnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan, sekaligus kepatuhan karena pengawasan (*enforced compliance*) sebagai konsekuensi dari pengawasan perpajakan yang semakin terintegrasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmayasa dan Hardika (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan melalui integrasi data secara digital. Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Ramadhan dan Wijaya (2025) yang menyatakan bahwa CoreTax memiliki persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) yang tinggi, meskipun persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) masih dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis sistem. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CoreTax tidak hanya berkaitan dengan penerimaan teknologi perpajakan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan dimensi *trust* dan *power* dalam *Slippery Slope Framework (SSF)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CoreTax memberikan implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui peningkatan kualitas administrasi perpajakan digital. CoreTax dinilai memberikan manfaat berupa integrasi layanan perpajakan, otomatisasi pelaporan dan pembayaran pajak, serta kemudahan akses informasi perpajakan yang mendukung efisiensi administrasi perpajakan. Namun, implementasi CoreTax masih menghadapi beberapa kendala seperti gangguan sistem, kompleksitas antarmuka, dan rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak yang memengaruhi *perceived ease of use* dalam penggunaan sistem. Berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)*, *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* memengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap CoreTax. Sementara itu, berdasarkan *Slippery Slope Framework (SSF)*, implementasi CoreTax memperkuat dimensi *trust* melalui peningkatan transparansi dan kualitas layanan perpajakan, serta memperkuat dimensi *power* melalui integrasi data dan pengawasan digital. Interaksi kedua dimensi tersebut mendorong terbentuknya *voluntary compliance* dan *enforced compliance* wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan stabilitas sistem, menyederhanakan antarmuka pengguna, serta memperluas edukasi dan pendampingan digital kepada wajib pajak agar implementasi CoreTax dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada wajib pajak badan atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur pengaruh penerapan CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adini, R., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2021, Agustus 2). Tax Compliance: Slippery Slope Framework and Theory of Reasoned Action Approach. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29, 1-15.

- Arini, S. C. (2024, Juni 29). *Ini Akibatnya Jika Tak Padankan NIK dengan NPWP*. detikFinance. Retrieved Mei 1, 2026, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7414654/ini-akibatnya-jika-tak-padankan-nik-dengan-npwp>.
- Badan Pusat Statistik. (2026, February 3). *Realisasi Pendapatan Negara - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved Mei 1, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Tahunan 2024. *Akselerasi Digitalisasi Perpajakan Untuk Penguatan Kapasitas Fiskal*, (2024), 204. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2024>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Coretax*. Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved Mei 1, 2026, from <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>.
- Günay, H. F. (2022, Oktober 27). Power and Trust As Determinants of Tax Compliance: An Evidence for The Slippery Slope Framework From Turkey. *ResearchGate*, 36(International Public Finance Conference), 1-9. https://www.researchgate.net/publication/365801577_POWER_AND_TRUST_AS_DETERMINANTS_OF_TAX_COMPLIANCE_AN_EVIDENCE_FOR_THE_SLIPPERY_SLOPE_FRAMEWORK_FROM_TURKEY.
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024, Juli 30). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 1-11. <https://greenationpublisher.org/JGIA/article/view/69/48>.
- MUC Consulting. (2025, March 19). *3 Faktor Penyebab Penerimaan Pajak Januari-Februari 2025 Anjlok 30%*. MUC Consulting. Retrieved Mei 1, 2026, from <https://muc.co.id/id/article/3-faktor-penyebab-penerimaan-pajak-januari-februari-2025-anjlok-30>.
- Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021, September 9). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. *ResearchGate*, 2(9), 1-24. https://www.researchgate.net/publication/359214297_Analisis_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi_dengan_Pendekatan_Extended_Slippery_Slope_Framework.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (1st ed.). Seribu Bintang. https://www.researchgate.net/publication/369378395_Teori_Dasar_Technology_Acceptance_Model.